BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Lebih dari 80% penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Sangatlah penting perannya pajak bagi negara Republik Indonesia dikarenakan telah menjadi tulang punggung pendapatan anggaran negara paling besar. APBN bertujuan untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional. Dari penerimaan APBN yang sebagian besarnya diperoleh dari pajak, maka pemerintah mengembalikannya secara tidak langsung kepada masyarakat dengan memberikan pengembangan infrastruktur, keamanan pertahanan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menambahkan jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan cara membayar jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar kepada pemerintah. Dengan bertambahnya APBN negara, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berkembang dan menguat sehingga dapat bersaing dengan negara lain, serta perekonomian Indonesia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak, yang dapat menambahkan APBN, menunjukkan bahwa kebaktian masyarakat kepada negaranya. Hal ini adalah untuk kebaikan dan kemakmuran yang akan dirasakan oleh masyarakat sendiri.

Namun berbagai kendala masih terjadi seperti keterlambatan dalam pembayaran pajak dan yang paling buruknya adalah penggelapan pajak, sehingga mengakibatkan jumlah penerimaan pajak yang kurang signifikan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan APBN. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak seperti tindakan penagihan pajak untuk melancarkan pelaksanaan pembayaran pajak yang bersifat memaksa dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam UU no. 19 Tahun 2000 Pasal 12 menyinggung penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), adalah salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk pelaksanaan penyitaan terhadap barang Penanggung Pajak yang apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaanya berada di tangan pihak lain.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak. Dengan adanya KPP Pratama Bandung Tegallega, maka akan mempermudah kegiatan pelunasan dan pengenalan mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak. Sangatlah tepat untuk dijadikan objek penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penagihan pajak dengan diterbitkankannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di KPP Pratama Bandung Tegallega.

Adapun tujuan dari Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di KPP Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SPMP.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan Kerja Praktek yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

- Dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan bagi pembaca serta sebagai bahan referensi yang dapat membantu untuk melakukan penulisan berikutnya.

- Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu teoritis yang selama ini di dapat di bangku kuliah.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan dari hasil Kuliah Kerja Praktek ini dapat dijadikan sebuah masukan bagi KPP Pratama Bandung Tegallega dalam pengambilan keputusan dan dalam membuat suatu program baru.

c. Bagi Institusi Pendidikan dan Mahasiswa

- Sebagai bahan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini dalam rangka melakukan penelitian.
- Memperoleh masukan guna pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan sebagai salah satu alat evaluasi terhadap kurikulum yang berlaku.

d. Bagi Penulis

- Memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya kontribusi masyarakat dalam hal perpajakan.
- Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanakan perpajakan terutama mengenai hal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.4 Metode Kuliah Kerja Praktek

Metode Kerja Praktek yang penulis laksanakan dengan menggunakan *Block Release,* yaitu pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode Kerja Praktek

tertentu, yaitu selama 25 hari kerja pada setiap hari kerja. Selain itu, untuk melengkapi data-data yang diperlukan, penulis melakukan studi kepustakaan dimana bermanfaat untuk membandingkan data informasi yang diperoleh dengan landasan teori yang didapat dari literature-literature dan bahan-bahan perkuliahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Study Literature

Study Literature, yaitu teknik untuk pengumpulan data yang ada dari buku-buku literature dan sumber informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ketempat yang menjadi lokasi praktek kerja. Data yang diperoleh merupakan data primer, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap segala kegiatan instansi dan mencatat informasi yang dapat mendukung, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya.

b. Interview

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek ini dilakukan di KPP Pratama Bandung Tegallega yang berlokasi di JL. Soekarno Hatta Nomor 216 Bandung. Adapun waktu kerja praktek tersebut dilaksanakan dari tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan 20 September 2013 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerja Praktek yang dilakukan dari hari Senin sampai dengan Jumat.
2. Kerja Praktek dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.

Tabel 1.1

Jadwal kegiatan

Tahap	Kegiatan	Juli				Agst				Sept				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	**Tahap persiapan**																								
	Persiapan Judul	■	■	■																					
	Menentukan tempat Kerja Praktek			■	■																				
	Pengajuan Proposal					■	■																		
	Penerimaan Kerja Praktek							■	■																
II	**Tahap Pelaksanaan**																								
	Perkenalan Perusahaan							■	■																
	Perkenalan pada KPP Pratama Bandung Tegallega								■	■															
	Pemantauan prosedur Penagihan Pajak								■	■	■														
	Review materi dan Pembahasan laporan							■	■	■	■	■													
III	**Tahap Pelaporan**																								
	Pengumpulan Data		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Penyusunan Laporan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Bimbingan laporan Kerja Praktek												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Revisi laporan												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	